
**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN *SMART CITY* OLEH DINAS
PERHUBUNGAN KOTA BANDUNG****(Studi Kasus Pengelolaan Alat Parkir Meter Dalam Program Terminal Parkir Elektronik)**

Imam Mutaqin¹
Danny Permana²
Lukman Munawar Fauzi³

1,2,3) Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fisip Unjani
imam725725@gmail.com

Abstrak

Penelitian Tesis ini berjudul “**Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan *Smart City* Oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung (Studi Kasus Pengelolaan Alat Parkir Meter Dalam Program Terminal Parkir Elektronik)**” diangkat karena pelaksanaan program terminal parkir elektronik di Kota Bandung, khususnya dalam pengelolaan alat parkir meter dianggap belum terlaksana secara efektif.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori mengenai efektivitas yang dikemukakan oleh Budiani (Pradipta dan Hariani, 2017) dengan indikator yang meliputi sosialisasi program, pemahaman program, tujuan program, perubahan nyata, dan sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data diantaranya wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan informan utama ialah Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Kepala UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung, Juru Parkir di Lokasi TPE, dan Masyarakat Umum Pengguna TPE.

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa selama pelaksanaan sosialisasi, minat juru parkir yang didapatkan cukup baik dan antusias, sedangkan masyarakat sendiri kurang mendapat respon antusias, karena penyebaran yang kurang merata, sehingga masyarakat masih belum mengetahui informasi-informasi secara jelas apa saja dalam program E-Parkir. Belum semua pihak memahami dan pengguna parkir mau membayar retribusi parkir melalui TPE,

terlihat dari masih banyaknya pengguna layanan jasa parkir yang malas dan tidak mau direpotkan dengan membayarkan retribusi parkirnya melalui TPE.

Sejauh ini sudah memperlihatkan hasil berdasarkan tujuan program yakni meningkatkan efisiensi pembayaran progresif dan perselisihan antara juru parkir dan masyarakat pengguna parkir dapat diminimalisir. belum terlihat adanya perubahan nyata terhadap kebiasaan masyarakat dalam menggunakan mesin parkir elektronik, terlihat dari masih ditemukan pada Zona Parkir Non tunai pun masih ada pengguna layanan parkir yang membayar menggunakan uang tunai. Dalam pemantauan program sudah cukup efektif dengan dibuktikan adanya bentuk perhatian yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung terhadap jalannya E-Parkir melalui pemantaun dan pengontrolan rutin mengenai pelaksanaan di lapangan seperti mendeteksi error, distribusi kertas struk dan mengingatkan alat pada juru parkir.

Kata Kunci: *Efektivitas, Program Parkir Elektronik, Alat Parkir Meter, Lokasi*

Abstract

The research in this thesis entitled "The Effectiveness of Smart City Policy Implementation by the Bandung City Transportation Agency (Case Study of Parking Meter Management in the Electronic Parking Terminal Program)" was raised because the implementation of the electronic parking terminal program in Bandung City, especially in the management of parking meters, is considered not to have been implemented effectively.

The theory used in this study is the theory of effectiveness put forward by Budiani (Pradipta and Hariani, 2017) with indicators including program socialization, program understanding, program objectives, real changes, and educational monitoring and control systems. The research method used is a qualitative approach with data collection methods including interviews, observations, and documentation, with the main informants being the Head of the Bandung City Transportation Agency, Head of the Bandung City Transportation Agency Parking UPT, Parking Attendants at TPE Locations, and the General Public Using TPE.

Based on the results of this study, it was found that during the implementation of the socialization, the interest of the parking attendants obtained was quite good and enthusiastic, while the community itself received less enthusiastic responses, because the distribution was not evenly distributed, so that the community still did not know clearly what information was in the E-Parking program. Not all parties understand and parking users are willing to pay parking fees through TPE, as seen from the many parking service users who are lazy and do not want to be bothered by paying their parking fees through TPE. So far, it has shown results based on the

program's objectives, namely increasing the efficiency of progressive payments and disputes between parking attendants and parking users can be minimized.

There has not been any real change in people's habits in using electronic parking machines, as seen from the fact that in the Non-Cash Parking Zone there are still parking service users who pay using cash. In monitoring the program, it has been quite effective as evidenced by the form of attention given by the Bandung City Transportation Agency to the implementation of E-Parking through routine monitoring and control regarding implementation in the field such as detecting errors, distributing receipts and reminding parking attendants.

Keywords: Effectiveness, Electronic Parking Program, Parking Meter Device, Location

PENDAHULUAN

Kebijakan adalah keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik, kebijakan pemerintah harus dibuat oleh otoritas politik, yaitu mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh implementor yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah.

Kurun waktu beberapa tahun terakhir, istilah *Smart City* telah menyebar ke seluruh dunia. *Smart City* adalah rencana untuk mengatasi tantangan yang berkembang di daerah perkotaan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan taraf hidup warganya. *Smart City* atau kota pintar adalah gagasan tentang komunitas yang membantu orang-orang yang tinggal di sana dengan mengelola sumber daya yang tersedia dan efisien dan menyediakan orang / lembaga di dalamnya informasi yang tepat untuk melakukan kegiatan atau untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak terdugatersebut.

Saat ini banyak daerah yang mulai mengimplementasikan *Smart City* sehingga menimbulkan ekspektasi yang tinggi dari masyarakat dan pemerintah akan dampak positif dari implementasi program *Smart City* untuk meningkatkan kualitas hidup atau kualitas kotanya sendiri. *Smart City* dianggap sebagai solusi potensial untuk masalah yang dihadapi banyak daerah di Indonesia, seperti masalah polusi, masalah transportasi umum, kesenjangan sosial, masalah

ekonomi, dan lain-lain.

Kota Bandung merupakan salah satu kota dengan perkembangan media dan teknologi, Bandung sebagai kota yang besar di Indonesia dan sedang berkembang kini sedang mencari sistem perkotaan yang berkembang dengan baik. Untuk itu, di era digital ini, kapasitas administrasi pemerintah daerah akan meningkat, tanggung jawab langsung terhadap pemerintah daerah sehingga mampu menyelesaikan masalah secara efektif dan efisien. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kota Bandung telah membuat konsep manajemen Bandung *Smart City* diseluruh unit/OPD Pemerintah Kota Bandung dikelola dengan baik.

Bandung *Smart City* merupakan konsep perkotaan yang bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh Kota Bandung. Konsep ini melibatkan penggabungan berbagai tautan dan wilayah di dalam kota untuk menciptakan pengelolaan yang efisien dan bermanfaat. Dengan menerapkan konsep *Smart City*, Kota Bandung berupaya mengatasi masalah seperti kemacetan, pengumpulan sampah, perbaikan infrastruktur jalan yang rusak, serta memperoleh pengetahuan tentang kondisi geografis daerah setempat untuk menentukan penggunaan lahan yang tepat, baik untuk konstruksi maupun pertanian.

Namun, pada fakta dilapangan, beberapa masalah yang dihadapi Kota Bandung antara lain kurangnya sumber daya, permukiman kumuh, peningkatan produksi sampah, polusi, kemacetan lalu lintas, dan kerusakan lingkungan. Masalah-masalah ini dapat menyebabkan kondisi fisik kota memburuk jika tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, Bandung *Smart City* hadir sebagai konsep inovatif yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Bandung. Konsep ini bertujuan untuk mengembangkan dan mengelola perkotaan dengan lebih baik, serta mengatasi masalah-masalah yang terjadi. Namun, penting untuk dicatat bahwa implementasi konsep *Smart City* tidak hanya terbatas pada penggunaan teknologi berbasis komputer. Konsep *Smart City* melibatkan integrasi teknologi, pemerintahan yang efektif, partisipasi masyarakat, dan pengembangan berkelanjutan yang holistik untuk mencapai kemajuan perkotaan secara menyeluruh.

Oleh karenanya, Kota Bandung sejauh ini dikenal dalam upaya-upaya inovasinya dalam membangun dan mengembangkan *Smart Government* sehingga memberikan inspirasi baru dalam hal pelayanan publik, serta memberikan kemudahan dalam pelayanan berbasis teknologi masa kini. Tingginya tingkat mobilitasi kendaraan di Kota Bandung berdampak pada penggunaan fasilitas parkir. Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor 272 Tahun 1996 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Parkir menjelaskan bahwa parkir adalah keadaan tidak Bergeraknya kendaraan yang bersifat sementara. Dalam menunjang kebutuhan parkir maka diperlukan fasilitas parkir yang memadai. Fasilitas parkir merupakan lokasi yang ditetapkan sebagai area untuk memarkirkan kendaraan yang bersifat sementara dalam waktu tertentu. Fasilitas parkir dilihat dari penempatannya terbagi menjadi dua yakni: (1) parkir pada tepi jalan (*on street parking*), dimana fasilitas parkir berada pada tepi jalan umum; dan (2) parkir di luar badan jalan (*off street parking*) yaitu fasilitas parkir yang dibuat khusus atau gedung parkir. Tentunya penempatan fasilitas umum dan penggunaan lahan untuk parkir tidak bisa disembarang tempat, harus dibangun dalam kawasan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Adanya konsep *Smart City* di Kota Bandung menarik untuk dikaji mengenai evaluasi kebijakan *Smart City* di Kota Bandung terutama pada indikator *smart mobility* yang bertujuan untuk menertibkan mobilitas kendaraan yang ada di Kota Bandung baik dari segi perparkiran, lalu lintas dan lain sebagainya.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang digunakan ialah metode kualitatif. Pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penyusunan laporan penelitian ini adalah menggunakan wawancara, observasi lapangan dengan pendekatan deskriptif. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif, peneliti dapat menjelaskan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau yaitu tanpa membuat perbandingan. Berupa menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, di mana data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan

perilaku yang dapat diamati. Selain itu peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam dengan analisis deskriptif, asumsi, dan teori.

Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau *human instrument*, yaitu peneliti itu sendiri. Untuk dapat menjadi instrumen, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksikan situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna.

KERANGKA PEMIKIRAN

Bandung *Smart City* merupakan konsep perkotaan yang bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh Kota Bandung. Konsep ini melibatkan penggabungan berbagai tautan dan wilayah di dalam kota untuk menciptakan pengelolaan yang efisien dan bermanfaat. Dengan menerapkan konsep *Smart City*, Kota Bandung berupaya mengatasi masalah seperti kemacetan, pengumpulan sampah, perbaikan infrastruktur jalan yang rusak, serta memperoleh pengetahuan tentang kondisi geografis daerah setempat untuk menentukan penggunaan lahan yang tepat, baik untuk konstruksi maupun pertanian.

Beberapa masalah yang dihadapi Kota Bandung antara lain kurangnya sumber daya, permukiman kumuh, peningkatan produksi sampah, polusi, kemacetan lalu lintas, dan kerusakan lingkungan. Masalah-masalah ini dapat menyebabkan kondisi fisik kota memburuk jika tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, Bandung *Smart City* hadir sebagai konsep inovatif yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Bandung. Konsep ini bertujuan untuk mengembangkan dan mengelola perkotaan dengan lebih baik, serta mengatasi masalah-masalah yang terjadi. Namun, penting untuk dicatat bahwa implementasi konsep *Smart City* tidak hanya terbatas pada penggunaan teknologi berbasis komputer. Konsep *Smart City* melibatkan integrasi teknologi, pemerintahan yang efektif, partisipasi masyarakat, dan pengembangan berkelanjutan yang holistik untuk mencapai kemajuan perkotaan secara menyeluruh.

Kota ini mengalami kemacetan lalu lintas yang parah, kurangnya parkir yang terorganisir dengan baik, dan aksesibilitas yang terbatas dalam penggunaan pelayanan publik. Selain itu,

perkembangan infrastruktur juga menjadi salah satu hasil dari penerapan konsep *Smart City*. Sebelumnya, Kota Bandung menghadapi tantangan dalam pengelolaan parkir yang tidak teratur dan minimnya ruang parkir yang tersedia. Namun, dengan penerapan Terminal Parkir Elektronik (TPE), kota ini berhasil meningkatkan efisiensi parkir dan mengurangi parkir liar yang merusak tata kota. TPE memungkinkan masyarakat untuk dengan mudah menemukan terminal parkir yang tersedia melalui aplikasi atau sistem informasi yang terintegrasi.

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1470 Tahun 2018 tentang Rencana Indung Bandung Kota Cerdas (Master Plan Bandung *Smart City*) Periode 2018-2023 menyatakan bahwa Kota Cerdas (*Smart City*) adalah pengelolaan kota yang memanfaatkan berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai persoalan kota menggunakan solusi inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk menyediakan infrastruktur dan memberikan layanan-layanan kota yang dapat meningkatkan kualitas hidup warganya.

Menurut data Dinas Perhubungan Kota Bandung, jumlah alat transportasi di Kota Bandung pada tahun 2023 mencapai 1,2 juta unit. Meningkatnya jumlah kendaraan merupakan sumber pendapatan yang baik bagi daerah melalui pengenalan retribusi parkir kendaraan. Namun permasalahannya adalah jumlah alat transportasi yang semakin banyak dan kebutuhan lahan parkir yang luas. Sementara itu, jumlah kendaraan terus bertambah, yang membuat terminal parkir semakin sempit, dan suara bising kendaraan terus meningkat. Berdasarkan Data Dinas Perhubungan Kota Bandung, bahwa di Kota Bandung telah terpasang kurang lebih sebanyak 445 mesin parkir elektronik, tepatnya pada 211 ruas jalan dengan mempekerjakan 700 juru parkir resmi.

Salah satu inisiatif yang telah diterapkan dalam konteks *Smart City* adalah penerapan Terminal Parkir Elektronik (TPE) diberbagai area parkir di kota ini. Namun, meskipun upaya tersebut telah dilakukan, masih terdapat banyak masyarakat yang belum merealisasikan penggunaan TPE dan masih membayar parkir secara manual kepada juru parkir. Sejak diluncurkan dan dilaksanakannya program ini, pengelolaan Terminal parkir Elektronik (TPE) belum mencapai target yang maksimal. Salah satunya ialah ketidakstabilan sistem pendukung

TPE misalnya, keberadaan TPE masih membutuhkan juru parkir yang bertugas untuk memandu petugas parkir dan akses ke TPE. Belum lagi masyarakat yang gagap teknologi karena kurangnya sosial sosialisasi. Para pengguna lahan parkir masih nyaman membayar parkir secara manual memberikan uang kepada juru parkir dan adapula yang membayar ganda akibat ketidaktahuannya.

Kemudian faktor masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang teknologi yang digunakan dalam TPE. Kurangnya sosialisasi yang efektif tentang penggunaan alat parkir meter elektronik ini membuat masyarakat belum sepenuhnya memahami cara penggunaan dan manfaat yang dapat diperoleh. Masyarakat masih cenderung menggunakan cara yang sudah umum dan terbiasa digunakan, yaitu membayar parkir secara manual ke juru parkir. Hal ini dapat disebabkan oleh ketidakpahaman masyarakat mengenai keuntungan dan kemudahan yang dapat diperoleh melalui penggunaan TPE.

PEMBAHASAN

Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan *Smart City* Oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung (Studi Kasus Pengelolaan Alat Parkir Meter Dalam Program Terminal Parkir Elektronik)

PAD dari retribusi pelayanan parkir di Bandung pada saat ini telah dilengkapi dengan Terminal Parkir Elektronik (TPE) atau biasa disebut *e-parkir*. TPE diresmikan langsung oleh Wali Kota Bandung bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung di Jalan Braga. TPE yang sudah dapat beroperasi berjumlah 445 unit di 57 titik tersebar di seluruh wilayah Kota Bandung. Penempatan unitunit TPE pada saat ini hanya berada pada pusat-pusat perkotaan. Tujuan diterapkannya sistem pelayanan parkir berbasis elektronik ini selain untuk memaksimalkan retribusi parkir dan mencegah potensi penyalahgunaan dana yang dikelola, juga memastikan retribusi yang dibayarkan pengguna layanan parkir diterima oleh Pemerintah Kota Bandung.

Tujuan penggunaan TPE ini adalah untuk memperbaiki administrasi perparkiran yang sebelumnya terasa kurang tepat dan untuk meminimalkan retribusi parkir liar. Selain itu, TPE dipilih untuk menggantikan sistem parkir manual dengan juru parkir yang berperan sebagai penerima retribusi parkir secara tunai. Dengan sistem manual tersebut, retribusi parkir yang bocor mencapai 16 miliar rupiah setiap tahunnya. Mesin dari TPE ini bermerek Cale yang berasal dari Swedia. Mekanisme penggunaan TPE tersebut tidaklah sulit. Pertama, pengguna layanan parkir memilih jenis kendaraan yang akan diparkirkannya, seperti truk, bus, mobil, atau sepeda motor. Setelah itu pengguna parkir memasukkan nomor polisi kendaraannya mengikuti petunjuk yang tertera. Selanjutnya, pengguna layanan parkir harus menentukan durasi waktu parkir. Kemudian TPE akan memberikan informasi nominal yang harus dibayar. Pembayaran parkir tersebut hanya dapat menggunakan uang elektronik (*electronic money* atau biasa disingkat *e-money*) yang berbentuk kartu. Kartu uang elektronik ini menggunakan teknologi RFID (*Radio Frequency Identification*) yang dapat memudahkan pemegang kartu untuk melakukan transaksi dengan cara tapping atau menempelkan kartu pada alat reader. Kartu uang elektronik dapat diperoleh dari Bank BUMN tertentu yang telah bekerja sama dengan kebijakan TPE dan memiliki produk kartu uang elektronik.

Tingkat efektivitas itu sendiri dapat ditentukan oleh terintegrasinya sasaran dan kegiatan organisasi secara menyeluruh, kemampuan adaptasi dari organisasi terhadap perubahan lingkungannya.

Sosialisasi Program

Berhasil tidaknya kebijakan ini adalah kesadaran masyarakat dalam mendukung kebijakan pemerintah. Kesadaran masyarakat sangat penting untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana daerah oleh Pemerintah Kota Bandung. Mengubah pola perilaku yang telah lama terbiasa bertransaksi secara tunai menjadi nontunai adalah bukan perkara mudah. Dibutuhkan upaya yang masif dan konsisten dalam meningkatkan PAD retribusi parkir melalui TPE. Ketegasan juga dibutuhkan sehingga memaksa pengguna layanan parkir agar membayarkan retribusi parkirnya melalui TPE.

Received :15 jan 2025

Accepted :15 jan 2025

Published :10 feb 2025

Proses perubahan pola perilaku masyarakat ini memang akan membutuhkan waktu, namun pemerintah harus berupaya untuk melakukan percepatan proses perubahan tersebut. Faktor ini tidak hanya berupa perubahan metode pembayaran dari tunai menjadi menggunakan TPE, tetapi lebih kepada bagaimana mengubah pola perilaku masyarakat pada umumnya dan khususnya pada pengguna layanan parkir agar terbiasa melakukan transaksi nontunai. Untuk mewujudkan perubahan pola perilaku tersebut, dibutuhkan sinergi antara pihak regulator, eksekutor, operator dan masyarakat sebagai pengguna layanan. Namun, dapat dipastikan Pemda Kota Bandung memiliki kekuatan yang besar untuk mewujudkan perubahan ini.

Pemahaman Program

Dalam konteks efektivitas kebijakan TPE, sasaran dari kebijakan ini adalah seluruh pengguna layanan parkir di area yang menggunakan TPE. Pada dasarnya, kebijakan TPE ini mengajak pengguna layanan parkir memutus rantai distribusi retribusi parkir sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Rantai distribusi yang dimaksud adalah bagaimana retribusi parkir yang dibayarkan pengguna parkir dikelola oleh juru parkir sebagai perwakilan Dinas Perhubungan di lapangan, kemudian disetorkan kepada Kepala Sektor, selanjutnya Kepala Sektor melanjutkan distribusi retribusi parkir tersebut kepada Bendahara Penerimaan sebelum akhirnya disetorkan pada kas daerah melalui Bank BJB sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan melakukan pembayaran retribusi parkir melalui TPE, retribusi yang dibayarkan pengguna layanan parkir akan langsung diterima kas daerah. Tentu saja, hal ini akan mengurangi potensi kerugian Pemerintah Kota Bandung yang diakibatkan oleh kebocoran retribusi parkir yang jalur distribusinya panjang dan minim pengawasan.

Tujuan Program

Suatu program diciptakan untuk mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Pelaksanaan program dapat dikatakan berhasil apabila mampu mendapatkan kesesuaian antara hasil dan output pelaksanaan program sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Adapun tujuan dari pelaksanaan E-Parkir adalah menciptakan kawasan parkir yang tertib dengan memberikan pelayanan yang efektif dan efisien melalui elektronik parkir dimana kepastian pembayaran parkir lebih transparan dan praktik juru parkir nakal dapat dihilangkan. Selain itu meningkatkan efisiensi pembayaran progresif dan perselihan antara juru parkir dan masyarakat pengguna parkir dapat diminimalisir.

Perubahan Nyata

Pada dasarnya seluruh TPE dapat digunakan dan berfungsi dengan baik. Apabila sedang tidak digunakan bertransaksi, maka TPE akan berada dalam mode *sleep*. Mode ini bertujuan untuk mengurangi konsumsi daya listrik pada TPE sehingga dapat mengurangi biaya operasional. Namun, hal ini membuat sebagian dari masyarakat beranggapan bahwa TPE rusak dan terbengkalai. Padahal, seluruh TPE dapat digunakan dengan terlebih dahulu menekan salah satu tombol yang tertera. Selain itu, pengguna layanan parkir juga mendapatkan bantuan dari juru parkir terlatih yang selalu ada di dekat TPE.

Sistem Pengawasan dan Pengendalian yang Bersifat Mendidik

Pada aspek pengawasan ini, pengawasan yang berdasarkan dari subyek pelaksanaannya, yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Yang dimaksud dengan pengawasan internal yaitu para pelaksana lapangan melakukan pengecekan ulang terhadap peralatan yang akan digunakan. Sehingga dalam pelaksanaannya dapat meminimalisir kesalahan diakibatkan oleh kesalahan alat. Dalam hal pengawasan internal, yang dalam hal ini adalah Petugas Lapangan telah melakukan pemeriksaan alat secara menyeluruh sebelum turun kelapangan untuk bertugas.

Sedangkan pengawasan eksternal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan dengan mengamati pekerjaan yang dilakukan dilapangan. Apakah sesuai dengan yang ditetapkan atau terjadi penyimpangan. Pengawasan yang kami lakukan itu merupakan pengawasan secara langsung kelapangan. Setiap beberapa jam, pengawas dari Dinas

Perhubungan sendiri berdasarkan masing-masing shift turun langsung ke titik-titik parkir online untuk melihat petugas dilapangan. Apakah mereka (petugas lapangan) main-main dalam bekerja atau tetap sesuai dengan aturan. Dapat dikatakan bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pengelola parkir online yaitu pengawasan secara langsung. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengecek apakah petugas berada dilapangan dan benar-benar bekerja atau tidak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Dalam sosialisasi program, selama pelaksanaan sosialisasi, minat juru parkir yang didapatkan cukup baik dan antusias karena terlihat adanya respon dalam menyikapi sosialisasi dengan sangat antusias karena dianggap membawa perubahan menuju kebaikan bagi perparkiran. Sedangkan dari masyarakat sendiri kurang mendapat respon antusias, karena penyebaran yang kurang merata, sehingga masyarakat masih belum mengetahui informasi-informasi secara jelas apa saja dalam program E-Parkir. Meskipun telah melakukan sosialisasi dengan mengencarkan melalui media sosial, namun jika tidak di imbangi dengan sosialisasi langsung secara merata pada masyarakat maka kurang berjalan maksimal penyampain tujuan program tersebut. Sedangkan masyarakat menginginkan sosialisasi diberikan secara langsung, berkala dan menyeluruh.
- 2) Dalam pemahaman program, belum semua pihak memahami dan pengguna parkir mau membayar retribusi parkir melalui TPE. Banyak dari pengguna layanan jasa parkir yang malas dan tidak mau direpotkan dengan membayarkan retribusi parkirnya melalui TPE terutama saat malam hari. Selain itu, ada juga pengguna layanan yang mau membayar menggunakan TPE namun mengalami kendala dengan jenis kartu uang elektronik yang dimilikinya. Oleh karenanya Dinas Perhubungan Kota Bandung dan ditindaklanjuti dengan rencana penambahan opsi kartu uang elektronik dari dua bank swasta lainnya. Selain itu, Belum semua titik parkir di ruas jalan yang retribusi parkirnya dikelola oleh Dinas

-
- Perhubungan Kota Bandung menggunakan TPE karena keterbatasan anggaran yang ada. Pengadaan TPE dan pembinaan juru parkir membutuhkan biaya yang besar sehingga belum dapat diterapkan pada seluruh titik parkir. Diharapkan dengan TPE yang ada, pengguna layanan dapat membayarkan langsung retribusi parkirnya kepada Pemerintah Kota Bandung.
- 3) Dalam tujuan program E-Parkir adalah menciptakan kawasan parkir yang tertib dengan memberikan pelayanan yang efektif dan efisien melalui elektronik parkir dimana kepastian pembayaran parkir lebih transparan dan praktik juru parkir nakal dapat dihilangkan. Selain itu meningkatkan efisiensi pembayaran progresif dan perselihan antara juru parkir dan masyarakat pengguna parkir dapat diminimalisir. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan keengganan membayar langsung melalui TPE karena belum memiliki kartu uang elektronik. Hal ini disebabkan karena pengguna sepeda motor merasa keberatan mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli kartu ditambah biaya *top up* untuk dapat menggunakan layanan parkir di zona nontunai TPE. Berbeda dengan pengguna mobil, rata-rata sudah memiliki kartu uang elektronik seiring dengan diterapkannya transaksi nontunai pada seluruh jalan tol di Kota Bandung.
 - 4) Pada aspek perubahan nyata, belum terlihat adanya perubahan nyata terhadap kebiasaan masyarakat dalam menggunakan mesin parkir elektronik. Hal ini dikarenakan masih ditemukan pada Zona Parkir Nontunai pun masih ada pengguna layanan parkir yang membayar menggunakan uang tunai. Salah seorang juru parkir di Zona Parkir Nontunai Jalan Braga tidak menyangkal hal tersebut. Ia sering dihadapkan pada situasi yang pada satu sisi diwajibkan hanya melayani pengguna layanan parkir yang membayar nontunai melalui TPE, pada saat yang bersamaan banyak sekali pengguna layanan yang masih membayar tunai, terutama pengguna layanan yang menggunakan sepeda motor. Ditambah target setoran yang dibebankan, membuatnya sering menerima pembayaran tunai.
 - 5) Sistem pengawasan dan pengendalian, pemantauan program sudah cukup efektif dengan dibuktikan adanya bentuk perhatian yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung terhadap jalannya E-Parkir melalui pemantaun dan pengontrolan rutin mengenai pelaksanaan

Received :15 jan 2025

Accepted :15 jan 2025

Published :10 feb 2025

dilapangan seperti mendeteksi error, distribusi kertas struk dan mengingatkan alat pada juru parkir. Pemantauan program yang dimaksud ialah pemeliharaan, pemantauan serta tanggung jawab pelaksana program terhadap berlangsungnya program. Sejak diberlakukan hingga saat ini, setiap hari rutin dilaksanakan pemantauan dan pengontrolan yang dilakukan oleh tim khusus tersendiri dari Telkom yang bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Kota Bandung. Tim tersebut dinamakan Tim Pemantauan Teknis di lapangan yakni EOS Meningkatkan motivasi pengguna layanan parkir untuk membayar retribusi parkir melalui TPE dengan Aplikasi Loyalitas Pelanggan Melakukan pengawasan langsung kepada juru parkir agar selalu menggunakan TPE dalam menerima retribusi parkir.

DAFTAR PUSTAKA

- Billqis, Aulia., Retno Suryawati. (2022). Implementasi Program Parkir Elektronik (E-Parkir) di Kota Surakarta. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, Vol 2, No (2)
- Caragliu, C Del Bo., P Nijkamp. (2011). *Smart Cities in Europe*. *Journal of Urban Technology*, Vol 18, No (2), hlm 65-82
- Chourabi, H., dkk. (2012). *Understanding smart cities: An integrative framework*. 45th Hawaii International Conference on System Sciences
- Cretu, A.E., RJ Brodie. (2012). *The Influence of Brand Image and Company Reputation Where Manufacturers Market to Small Firms: A Customer Value Perspective*. *Journal of Industrial Marketing Management*, Vol 36, hlm 230-240
- Dameri, RP., Rosenthal-Sabroux, C. (2014). *Smart City: How to Create Public and Economic Value with High Technology in Urban Space*. Switzerland: Spronger International
- Deakin, M. (2014). *Smart Cities*. Routledge
- Dunn, William N. (1998). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UGM Press
- Gartner. (2016). *Building the Digital Platform*. The 2016 CIO Agenda Report
- Gedeian, Arthur G., dkk. (1991). *Organization Theory and Design*. Jakarta: Universitas Terbuka

-
- Giffinger, R. (2007). *Smart City Ranking of European Medium Sized - City*. Centre of Regional Science Journal. Vienna University
- _____, H Gudrun. (2010). *Smart Cities Rangking: an Effective Instrumen for the Positioning Of Cities*. ACE: Architecture (City and Environment), Vol 4, No (12)
- Holland, JH., DE Goldberg. (2008). *Algorithms and Machine Learning*. MIT Press
- Hoobs, FD. (1995). *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas (Edisi Kedua)*. Yogyakarta: UGM Press
- Kireina, Hana Andhiga Prasady. (2017). *Analisis Strategi Pengembangan Sektor Pertanian Subsektor Tanaman Pangan Dalam Upaya Peningkatan PDRB Kabupaten Magelang*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia
- Kurniawan. (2005). *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan
- Lindawati, MZ. (2012). *Analisis Kebutuhan dan Penataan Ruang Parkir di Kampus Universitas Baturaja*. Jurnal Teknik, Vol 2, No (3)
- Moenir, HAS. (2006). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Moleong, Lexy J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nam, T., TA Pardo. (2011). *Conceptualizing Smart City with Dimensions of Technology, People, and Institutions*. The Proceedings of the 12th Annual International Conference on Digital Government Research, pp. 282-291
- Pajrin, Ahmda Alqi. (2018). *Pengelolaan Parkir Online dalam Mendukung Peningkatan Pendapatan Retribusi Parkir di Kota Makassar*. Makassar: STIA LAN Makassar
- Pradana, Galih Wahyu., dkk. (2021). *Kebijakan Parkir Elektronik Sebagai Salah Satu Wujud Penerapan Smart City di Kota Surabaya*. Jurnal Manajemen Kebijakan Publik, Vol 6, No (2)
- Pradipta, R., D Hariani. (2017). *Efektivitas Program Terminal Parkir Elektronik (TPE) di DKI Jakarta (Studi Kasus Jalan H. Agus Salim atau Jalan Sabang Jakarta Pusat)*. Journal of Public Policy and Management Review, Vol 6, No (2), hlm 189-199

-
- Pribawana, R., O Kurniadi. (2018). *Strategi Komunikasi Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam Mensosialisasikan Mesin Parkir Elektronik*. Jurnal Hubungan Masyarakat
- Putri, Shinta Permana. (2023). *Pengaruh Smart City dalam Menentukan Keberhasilan City Branding Pada Kelompok Target Penduduk di Kota Surabaya*. Jurnal Arsip Rekayasa Sipil dan Perencanaan (JARSP), Vol 6, No (1)
- Qohar, Muhammad Taufan. (2018). *Analisis Implementasi Kebijakan Terminal Parkir Elektronik di Kota Bandung*. Jurnal Wacana Kinerja, Vol 21, No (2)
- Safitri, Benita. (2012). *Pengelolaan Parkir On-street oleh Unit Pengelola Perpustakaan DKI Jakarta*. Depok: Universitas Indonesia
- Shapiro, Jesse. (2006). *Smart Cities: Quality of Life, Productivity, and the Growth Effects of Human Capital*. The Review of Economics and Statistics Journal, Vol 88, No (2)
- Solichin, Abdul Wahab. (1991). *Analisa Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Steers, M Richard. (1985). *Efektivitas Organisasi Perusahaan*. Jakarta: Erlangga
- Sugiyono. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.
- Syamsi, Ibnu. (1988). *Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen Umum*. Jakarta: Bina Aksara
- Tobing, Paul L. (2011). *Manajemen knowledge Sharing Berbasis Komunitas*. Bandung: Knowledge Management Society Indonesia
- Widyaningsih, Aristanti. (2013). *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Bandung: Alfabeta
- Winarno, Budi. (2007). *Kebijakan Publik; Teori dan Proses*. Jakarta: PT Buku Kita
- Zahnd, Markus. (2006). *Perancangan kota Secara Terpadu Mendefinisikasi Efektivitas dan Efisiensi*. Bandung: Remaja Rosdakarya

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 272 Tahun 1996 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Retribusi Parkir

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung 2005-2025

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1470 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Bandung Kota Cerdas (Master Plan Bandung *Smart City*) Periode 2018-2023

Peraturan Walikota Bandung Nomor 1392 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susuna Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Bandung

Peraturan Walikota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.